

RELASI KEKUASAAN DAN ARSITEKTUR: DARI DEKONSTRUKSI KE SUSTAINABLE CITY

M. S. Barliana Iskandar

Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Arsitektur, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Sistem politik dan kekuasaan, seperti elemen kebudayaan lainnya memiliki relasi dengan ekspresi arsitektur atau lingkungan binaan. Terlebih lagi, ketika kekuasaan dipandang sebagai faktor dominan yang menentukan proses-proses dan transaksi-transaksi sosial budaya antara peran negara di satu sisi dengan partisipasi rakyat di sisi lainnya. Telaah ini ingin menunjukkan bahwa ternyata terdapat relasi yang paralel baik langsung maupun tidak langsung, antara kekuasaan orde baru yang otoriter dengan karakteristik arsitektur modern, serta antara kekuasaan orde reformasi atas dasar asumsi negara demokratis dengan arsitektur postmodern dan atau dekonstruksi yang berimplikasi terhadap kemungkinan implementasi konsep *sustainable city*.

Kata kunci: kekuasaan, reformasi, demokrasi, dekonstruksi, *sustainable city*.

ABSTRACT

Political power system, like as another culture have a relation with architectural expression or built environment, especially when the political power as a dominant factor in the process and social culture transaction between government in oneside and the people partisipation in another. This analysis is to find paralel ralationship between Orde Baru as a otoriter power with modern architecture and between Orde Reformasi based on democratic state with post modern architecture and/or deconstruction who has implication to the sustainable city concept implementation possibility.

Keywords: power, reformation, democracion, deconstruction, sustainable city.

CATATAN AWAL: ARSITEKTUR SEBAGAI PROSES DAN PRODUK BUDAYA

Arsitektur atau lingkungan binaan sesungguhnya bukan sesuatu yang independen. Arsitektur dan arsitek mencerap atau bahkan pada tingkat tertentu dicerap oleh sosiokultur yang melingkupinya. Oleh sebab itu, untuk mengkaji dan mengerti arsitektur, maka penting pula untuk menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi dan relasi-relasi yang terbentuk serta berkait berke-lindan dengan arsitektur itu sendiri. Dalam dataran ini, arsitektur dapat dilihat sebagai produk dan proses budaya.

Sebagai produk budaya, teori dari *Altman* (1980) menjelaskan bahwa lingkungan binaan pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, faktor budaya, dan teknologi. Faktor lingkungan, mencakup kondisi alamiah lingkungan seperti faktor geografis, geologis, iklim, suhu, dan sebagainya. Faktor teknologi, meliputi aspek pengelolaan sumber daya dan ketrampilan teknis membangun. Faktor budaya, di antara banyak definisi tentang kebudayaan, *Altman*

menjelaskannya sebagai aspek-aspek falsafah, kognisi lingkungan, persepsi, norma dan religi, struktur sosial, struktur keluarga, dan lain-lain.

Di sisi lain, arsitektur juga dapat dipandang sebagai bagian dari proses budaya. Sebagai bagian dari proses budaya, arsitektur berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tujuan kemanusiannya. Proses berarsitektur, menurut *Mangunwijaya* (1992), seperti juga *berbahasa*, melangkah, ialah upaya manusia untuk semakin menyatakan dan *menyempurnakan ada diri kita*, semakin manusiawi dan semakin manusiawi.

Apa yang dikemukakan oleh Mangunwijaya di atas, bahwa arsitektur merupakan sarana untuk menyatakan dan menyempurnakan ada diri manusia sehingga lebih manusiawi dan semakin manusiawi, sesungguhnya berada pada tataran normatif. Kenyataannya, selalu ada jarak yang terkadang jauh antara tataran normatif dengan tataran praksis. Terlebih lagi, ketika arsitektur sebagai produk budaya yang tidak independen, berada pada suatu ruang waktu yang dipenuhi oleh berbagai hasrat manusia untuk berkuasa, untuk menjadi penakluk.

Dalam konteks itu, mudah dilihat bahwa ketika masa menuju milenium ke tiga, dunia masih terus senantiasa bergemuruh dengan mesin gilas kapitalisme dan kolonialisme baru, huru-hara peperangan, cengkraman rezim totaliter, revolusi berdarah, poros-poros ketegangan dan disparitas sosial ekonomi yang menganga, dan sebagainya. Inti dari semua itu sesungguhnya terletak pada terma penumpukan kekuatan (*force*) dan hegemoni.

Pabottingi (1986) dengan mengutip pernyataan **Gramsci**, menyatakan bahwa kekuatan (*force*) diartikan sebagai penggunaan daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syarat-syarat suatu cara produksi (budaya) tertentu. Sementara hegemoni berarti perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif” dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas berkuasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral, dan politik yang mewujudkan dalam bentuk-bentuk kooptasi institusional dan manipulasi sistemik atas teks dan tafsirnya.

Jika “teks” ialah berarti seluruh wacana dan realitas budaya, dan bukan sekedar meliputi bahasa, maka arsitektur termasuk ke dalam teks yang dimaksud **Gramsci**. Arsitektur, dengan demikian, tidak mungkin terlepas dari pengaruh sistem kekuasaan yang berlaku di suatu negara. Dalam lingkup terma **Altman** di atas, kekuasaan dapat digolongkan ke dalam norma dan falsafah yang mempengaruhi lingkungan binaan.

Di tengah transformasi dan transisi politik serta kekuasaan yang berlangsung di Indonesia saat ini, yang seringkali diwakili dengan istilah populer era reformasi, adalah menarik mengkaji relasi-relasi kekuasaan dengan arsitektur (kota). Kajian ini berfokus pada hal itu, melalui pendekatan analisis historik dan deskriptif untuk melihat hubungan kekuasaan dengan arsitektur di masa lalu dan masa kini, serta analisis preskriptif untuk melihat kecenderungan hubungan kekuasaan dengan arsitektur di masa depan.

Analisis ini tidak ditempatkan dalam kerangka pemikiran yang sangat deterministik, bahwa variabel kekuasaan dan arsitektur berada pada struktur sebab akibat secara langsung. Telaah hanya akan menunjukkan bahwa ternyata terdapat relasi yang paralel baik langsung maupun tidak langsung, antara kekuasaan orde baru yang otoriter dengan karakteristik arsitektur modern, serta antara kekuasaan orde reformasi atas dasar asumsi negara demokratis dengan arsitektur postmodern dan atau dekonstruksi.

KEKUASAAN NEGARA DAN ARSITEKTUR: ANTARA PERAN NEGARA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MADANI

Kekuasaan, pada dasarnya terbentuk karena adanya tarik menarik antara peran negara di satu sisi dengan partisipasi rakyat di sisi lain, dan berlangsung dalam sistem politik. Dalam kerangka itu, **Moughtin (1992)** mengungkap tipologi sistem politik, yang terdiri dari 4 sistem; anarki, demokrasi partisipasi, demokrasi perwakilan, dan totaliter.

POLITICAL SYSTEM	
1. Anarchy	
2. Participatory Democracy	Democratic government
3. Representative Democracy	
4. Totalitarian Government	

Moughtin selanjutnya menjelaskan tingkat dan derajat partisipasi rakyat. Tingkat partisipasi rakyat paling tinggi (masyarakat madani) berada dalam pemerintahan demokrasi dengan kontrol sepenuhnya di tangan warga negara. Sementara pada negara otoriter, tidak ada partisipasi, yang terjadi adalah strategi manipulasi untuk kelangengan kekuasaan.

LEVEL OF PARTICIPATION	
1. Citizen control	Degrees of Citizen Power
2. Delegated power	
3. Partnership	
4. Placation	Degrees of Tokenisme
5. Consultation	
6. Informing	
7. Therapy	Non Participation
8. Manipulation	

Tarik menarik antara peran negara yang diwakili pemerintah dengan partisipasi masyarakat, pada dasarnya berlangsung dalam interaksi yang dialektis sehingga secara keseluruhan membentuk negara itu sendiri. Dalam konteks ini, **van Langenberg (1996)** menyatakan bahwa, sifat negara (tunggal) adalah hasil interaksi dari struktur berlapis, yaitu-kekuasaan, legitimasi, akumulasi, dan budaya-tempat negara dan masyarakat berinteraksi secara dialektis.

Kekuasaan, seperti dijelaskan Gramsci, ialah berarti perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif” dari kelompok-kelompok subordinat yang terkooptasi lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral, dan politik. Legitimasi, berarti kepercayaan, keabsahan, dan pengakuan yang diberikan rakyat kepada pemerintah (sistem negara) nya. Akumulasi, ialah proses penum-

pukan kekuasaan sistem negara melalui proses-proses dan transaksi budaya yang berlangsung antara negara dengan masyarakat dan antara kelompok-kelompok masyarakat sendiri.

Mengadaptasi teori dialektis sistem negara-masyarakat itu, telaah ini meninjau relasi kekuasaan dan arsitektur berdasarkan aspek-aspek berikut: (1) Orientasi kekuasaan, ideologi, orientasi kesejarahan, dan strategi memperoleh legitimasi; (2) Sistem produksi sosial-budaya, ekonomi, teknologi, dan bahasa.

Pemilahan itu didukung oleh asumsi dari **van Langenberg** pula, bahwa negara, secara simultan, ialah sebuah entitas, arena, dan ide. Segi fungsional dan ideal dari negara ini saling bergantung dan berjalin rapat. Hasil keseluruhannya terdiri dari empat arena utama; sistem negara, kelompok masyarakat, dunia swasta, dan wilayah publik, serta empat proses; dominasi, hegemoni, produksi, dan pasar berlangsung.

KEKUASAAN ORDE BARU DAN ARSITEKTUR MODERN: KUALITAS LINGKUNGAN BINAAN YANG TERDEGRADASI

Beberapa rujukan dan kerangka berfikir tersebut di atas, akan menjadi pisau analisis untuk menelaah relasi kekuasaan dengan arsitektur. Melalui pendekatan dan analisis deskriptif, berikut ini akan dikaji asumsi dasar bahwa sistem kekuasaan negara orde baru ternyata memiliki paralelisme dengan karakteristik arsitektur modern yang kemudian termanifestasikan dalam ekspresi lingkungan binaannya.

Menurut **Clark** dan **Dear** (1984) terdapat dua garis besar orientasi kekuasaan; pendekatan yang terpusat pada negara (*state centered*), dan terpusat pada masyarakat (*society centered*). Pemerintahan orde baru, setidaknya diwakili oleh figur Suharto, yang beberapa waktu lalu diruntuhkan oleh gerakan mahasiswa, tampaknya memilih pendekatan pertama, yaitu kekuasaan yang berpusat pada negara.

Pemerintahan orde baru, meskipun mengklaim sebagai pemerintahan demokrasi (Pancasila), dalam praksis sesungguhnya merupakan negara otoriter, sentralistik, dan hirarkis. Guna mengukuhkan legitimasinya, menurut **van Langenberg** (1996) lebih jauh, penguasa orde baru sebagai sistem negara (pemerintahan eksekutif, militer, polisi, parlemen, birokrasi, dan pengadilan), mengokohkan konstruksi hegemoni lewat ketertiban, stabilitas dan

keamanan nasional, pelabelan bahaya laten di dalam tubuh politik dan masyarakat, ideologi pembangunan untuk kemajuan material dan modernisasi, konstitusionalisme dan fetisisme hukum, serta kesakralan filosofi nasional dan korporasi nasionalisme.

Inti dari sistem negara orde baru ialah oligarki. Pada dasarnya, negara berada di bawah perintah sebuah oligarki di sekeliling Suharto dengan lembaga kepresidenannya, yang menangani kontrol dan manajemen negara; kebijakan, mobilisasi, dan keamanan. Sementara itu, azas tunggal Pancasila, memaknai negara sebagai entitas totaliter/korporat, dan karena itu setiap perbedaan adalah subversif.

Di samping itu, yang menjadi dasar dan sekaligus karakteristik utama negara adalah konsep dwifungsi ABRI, yaitu bentuk militerisme dengan bungkus fungsionalisme sipil. Kemudian formulasi ideologi wawasan nusantara, yang menegaskan secara abstrak maupun material, unifikasi kepulauan negara bangsa sebagai organisme total.

Berdasarkan konstelasi kekuasaan semacam itu, terbentuk suatu akumulasi interaksi dalam transaksi sosial-budaya antara negara dan masyarakat yang timpang. Dalam sistem produksi sosial budaya, berkaitan dengan orientasi kesejarahan, orde baru menciptakan paradoks. Pada satu sisi, ia anti sejarah dan menganggap masa lalu sebagai "kutukan" dalam bentuk krisis ekonomi dan pembunuhan serta kekerasan melalui peristiwa kudeta oleh PKI. Karena itu, kemudian segala tindakan penguasa didasarkan pada upaya untuk menumpas kutukan itu. Di sisi lain, meminjam istilah **Geertz** (1982), negara orde baru ialah sebuah "negara teater". Negara teater, ialah negara dengan kekuasaan yang ditegakkan melalui upacara-upacara, seni pemujaan, dan produksi aneka simbol yang meligitimasi "raja" dan istana sebagai pusat dari tatanan hirarki kosmos. Menurut **Geertz** lebih jauh, ritual negara teater orde baru ini bukan sekedar merupakan hiasan kekuasaan tapi merupakan substansinya.

Dalam sistem produksi ekonomi, sistem oligarki menciptakan kronisme dalam struktur *ersatz capitalism*. Struktur ini memproduksi masyarakat individualistik serta kesenjangan sosial ekonomi antara OKB (orang kaya baru) dan konglomerasi di satu sisi, dengan kaum marjinal di sisi lainnya. Utopia *trickle down effect* dan konsep tinggal landas (berdasar teori WW. Rostow), kemudian hanya melahirkan krisis berkepanjangan.

Sementara itu, sistem produksi teknologi yang berlandaskan teknologi impor dan produksi massal, sekedar hanya menjadi instrumen kekuasaan. Sama halnya dengan bahasa, yang dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan, melahirkan berbagai akronim dan eufemisme yang mendestruksikan dirinya sendiri.

Jika dicermati, seluruh karakter dan dimensi sistem kekuasaan negara Orde Baru, baik langsung maupun tidak langsung memiliki relasi dan paralelis dengan konsep arsitektur modern serta ekspresi dalam lingkungan binaannya. Indikasinya adalah sebagai berikut.

Awuy (1994), menyatakan bahwa modernisme telah melahirkan cara berfikir sentralisme, kesatuan, dan totalitarian. Sementara **Siswanto** (1994), mengungkapkan karakteristik arsitektur modern sebagai: "Totalitarianisme arsitektural yang tunggal rupa; secara metodologi bentuk mengikuti fungsi, secara formal simplikasi bentuk. Arsitektur direduksi menjadi image dan komoditi ekonomis. Prinsip desain arsitektur; sistem grid modular dengan kulit penutup tipis puritan tanpa artikulasi, teori *universal space* yang kacau, orientasi komposisional yang a-simetri dan a-hirarkis tetapi ngawur. Misi reformasi sosial arsitektur modern dilupakan; permukiman untuk massa dikacaukan dengan perumahan massal, metoda desain yang rasional dikacaukan dengan menampilkan bangunan secara rasional. Arsitektur sebagai objek dipisahkan dari makna sosial karena objek dianggap a-historis. Makna dan bentuk tidak saling berkaitan karena objek tidak lagi bersubjek. Subjek dari arsitektur dan desain kota bukan lagi masyarakat, tetapi birokrasi dan kapitalis."

Dengan menelaah rujukan itu, juga dengan melihat bukti-bukti ekspresi lingkungan binaan yang tercipta di Indonesia, tampak jelas bahwa kekuasaan yang dilandaskan pada filsafat absolutisme melahirkan pula arsitektur yang absolut dan tunggal rupa. Yang terjadi kemudian ialah lingkungan binaan terutama kota-kota yang kualitasnya terdegradasi.

KEKUASAAN ORDE REFORMASI DAN MASYARAKAT MADANI: DARI DEKONSTRUKSI KE SUSTAINABLE CITY

Sejak runtuhnya kekuasaan negara orde baru, Indonesia menghadapi masa transisi yang krusial. Negara Indonesia baru yang dicita-citakan sejak reformasi dimulai, sesungguhnya baru merupakan harapan.

Meski demikian, ketika transisi kekuasaan ini dapat dilewati dengan damai, dan proses-proses transaksi politik menghasilkan pemerintahan yang *legitimate* dengan ideologi demokrasi, maka dapat diharapkan bahwa Indonesia sedang akan membentuk konstelasi dan kultur masyarakat baru dan reformatif. Meminjam kerangka pikir **Moughtin** (1992), pemerintahan demokrasi akan diwarnai dengan kontrol seimbang oleh warga negara, partisipasi, dan kemitraan. Dalam kerangka ini akan terbentuk masyarakat madani (*civil society*), suatu kelompok masyarakat menengah yang mandiri, kuat, dan mampu mengontrol perilaku kekuasaan.

Selanjutnya, jika mencermati, setidaknya wacana publik dan konsep-konsep awal para penentu kebijakan dan para pakar, meskipun mungkin kental diwarnai kepentingan politik, tetapi terma-terma semacam desentralisasi, debirokratisasi, otonomi, dan bahkan federalisme, nampaknya menjadi orientasi dan infrastruktur baru dari kekuasaan. Sementara itu azas tunggal ditanggalkan, dwifungsi TNI dan militerisme dikurangi, dan peran masyarakat madani meningkat karena perbedaan, pluralitas, dan oposisi dimungkinkan.

Dengan partisipasi masyarakat madani, maka pendekatan kekuasaan tidak berpusat pada negara tetapi berpusat pada masyarakat. Termasuk dalam hal ini, masyarakat marjinal yang selama ini tidak terwakili, serta hanya sekedar menjadi objek dan tumbal dari ideologi "pembangunan".

Orientasi, ideologi, dan struktur kekuasaan semacam itu, tampaknya akan memberi implikasi luas bagi bentuk-bentuk perkembangan sosio-kultural, termasuk relasinya dengan arsitektur atau lingkungan binaan. Ini sejalan dengan kecenderungan, setidaknya perdebatan ataupun kontroversi, tentang arsitektur postmodern dan dekonstruksi.

Postmodernisme dalam arsitektur, pada dasarnya terdiri dari dua mazhab. Pertama, arsitektur postmodern sendiri sebagai suatu kritik terhadap arsitektur modern dalam konteks kebudayaan, historis, dan komunikasi. Kedua, ialah neomodern yang berlandaskan kepada konsep **dekonstruksi**, yang menekankan kepada persoalan epistemologi dan metode desain seperti dalam bahasa arsitektur, simbol, wacana, dan makna arsitektur. (Lihat **Klotz**, 1988; **Siswanto**, 1994).

Sementara itu, **Jenck** (1978) mendefinisikan postmodernisme sebagai dunia yang paradoksal, berkode ganda, berdasarkan kombinasi dari tek-

nik modern dengan lainnya biasanya bangunan tradisional agar arsitektur bisa berkomunikasi dengan publik, bahkan publik minoritas yang tidak terwakili. Dalam kalimat filosofis Lyotard (1979), “Marilah kita berperang terhadap totalitas, marilah kita menjadi saksi bagi yang tidak terwakili, marilah kita mendorong munculnya perbedaan”. Oleh sebab itu, fragmentasi, bentuk majemuk, polisemi, simbol ganda, diskontinuitas dan pluralisme menjadi ciri penting dari arsitektur postmodern.

Sementara itu, dalam hal dekonstruksi, Wiryomartono (1994) mengungkap beberapa pernyataan kunci konsep *deconstruction* dari Derrida. Bahwa sikap *deconstruction* senantiasa afirmatif dan tidak negatif; menembus dan menerobos berbagai wilayah disiplin keilmuan adalah *necessities* dari *deconstruction*; *deconstructive architecture* adalah bukan untuk membangun sesuatu yang nyeleneh, sia-sia, tanpa bisa dihuni, tetapi untuk membebaskan seni bangunan dari segala keterselesaian yang membelenggu; *deconstruction* tidak sesederhana untuk melupakan masa lalu, tetapi membuat inskripsi kembali yang melibatkan rasa hormat pada tradisi; *deconstruction* senantiasa memberi perhatian pada kelipatgandaan, keanekaragaman, dan mempertajam keunikan-keunikan yang tak dapat direduksi dari masing-masing.

Dengan mencermati secara preskriptif beberapa karakteristik (teoritis) dari kekuasaan pada negara demokratis yang reformatif dan masyarakat reformasi yang demokratis, dibandingkan dengan karakteristik (konseptual) arsitektur postmodern dan dekonstruksi, bisa dilihat relasi dan benang merah yang menghubungkan keduanya. Relasi semacam ini, tampaknya dapat menjadi pijakan awal untuk mengembangkan konsep *sustainable city*. Soalnya, konsep dan implementasi *sustainable city* pun mengandaikan infrastruktur kekuasaan yang memberi tempat bagi wacana-wacana demokratisasi, desentralisasi, otonomi, debirokratisasi, emansipasi, keadilan, dan sebagainya. Dalam infrastruktur semacam inilah, masyarakat madani akan menjadi objek sekaligus subjek yang berperan dalam mengembangkan *sustainable city*.

Guna menelaah secara lebih jelas, berikut ini digambarkan relasi karakteristik kekuasaan (pemerintahan) demokrasi, dekonstruksi, dan *sustainable city*.

Skenario Optimis: Jika Reformasi Berhasil

Paralel Kekuasaan Negara Indonesia Baru (Orde Reformasi) dengan Arsitektur Postmodern/Dekonstruksi dan *Sustainable City*

ASPEK	NEGARA ORDE REFORMASI	ARSITEKTUR POSTMODERN/DEKONSTRUKSI*)	EKSPRESI SUSTAINABLE CITY **)
Orientasi kekuasaan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Demokrasi ➢ Desentralisasi ➢ Otonomi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Demokrasi ➢ Tidak ada yang absolut dalam arsitektur ➢ Tak ada tokoh yang perlu diagungkan ➢ Struktur tanpa pusat dan non hirarki (<i>decentering</i>) ➢ Otonomi dekonstruksi-rekonstruksi ➢ Desentralisasi tapi sekaligus terkonsentrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <i>Democracy</i> ➢ <i>Desentralitation and Concentration</i>
Ideologi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pluralitas ➢ Kesejahteraan ➢ Perbedaan dan oposisi diberi tempat 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pluralitas pandangan, tata nilai, fungsi (polisemi, kode ganda, multifungsi) ➢ Struktur <i>difference</i> dan <i>diffarence</i> ➢ Disjunction (fragmentasi, superimposisi, kombinasi) ➢ Tafsir luas atas kemungkinan & kemustahilan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Variety
Orientasi kesejarahan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sejarah sebagai inspirasi. ➢ Masa lalu sebagai orientasi menuju masa depan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sejarah sebagai inskripsi ➢ Diskontinuitas ➢ Refleksi narasi sejarah/tradisi 	
Strategi memperoleh legitimasi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kesetaraan antar elemen sistem negara ➢ Partisipasi seimbang ➢ Transparansi perilaku birokrasi ➢ Penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Fleksibilitas ➢ Konsultasi ➢ Partisipasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Flexibilitas ➢ Consultation ➢ Creative relationship

Sistem produksi sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Masyarakat personal-sosial ➢ Menghargai sumber lokal ➢ Pendekatan pada demand 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Arsitektur esensial, kontekstual, makna sosial ➢ Arsitektur personal, fragmentatif ➢ Akses bagi yang tak terwakili/marjinal (<i>permeability</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Permeabilitas
Sistem produksi ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keseimbangan ekonomi konglomerasi dan ekonomi rakyat ➢ Sumber lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Inhibitasi gaya hidup harmoni ➢ Melayani masyarakat ➢ Menghidupkan industri material lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Local context ➢ Economy of means ➢ Appropriate scale
Sistem produksi teknologi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kreatif teknologi ➢ Ekoteknologi ➢ Sumber lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Arsitektur organik/natural ➢ Arsitektur hijau ➢ Personal, fragmentatif, konteks lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Organic design
Sistem produksi bahasa	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bahasa "bebas", "langsung" ➢ Pluralisme bahasa dan simbol 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyangkal makna tunggal dan koheren dalam teks ➢ Makna tidak identik dengan tanda ➢ Interpretasi tanpa batas dan sirkuler 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Consultation

*) Jenck, Charles,(1988). *Late Modernism versus Post Modernism*. New York: UIA Journal Vol 1/No.1.

***) Haughton, Graham and Colin Hunter (1994). *Sustainable Cities*. London: Jessica Kingsley Publishers Ltd

CATATAN AKHIR: SUSTAINABLE CITY, ANTARA UTOPIA DAN REALITAS

Sistem politik dan kekuasaan, berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan memiliki relasi baik langsung maupun tidak langsung dengan ekspresi arsitektur atau lingkungan binaan. Terlebih lagi, ketika kekuasaan dipandang sebagai faktor dominan yang menentukan proses-proses dan transaksi-transaksi sosial budaya antara peran negara di satu sisi dengan partisipasi rakyat di sisi lainnya.

Dalam negara Indonesia baru, jika transisi kekuasaan berjalan damai, yang memberi tempat bagi demokratisasi, desentralisasi, pluralisme, dan otonomi, ada harapan bahwa arsitektur dengan konsep postmodern dan dekonstruksinya berkembang untuk memproduksi berbagai kemungkinan dalam ekspresi lingkungan binaan. Meski memiliki sisi paradoks dan utopianya sendiri, gerakan arsitektur yang lebih kritis tersebut, jika disertai partisipasi dan kesadaran akan ruang publik, memberi peluang eksplorasi lebih jauh terhadap lingkungan binaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan (*sustainability*).

Jelas bahwa itu pun bukan sesuatu yang mudah, karena lebih mudah mendekonstruksi daripada merekonstruksikannya kembali. Terlebih lagi, jika euphoria reformasi dan demokratisasi justru menjadi tirani baru, dalam bentuk anarki kebebasan tanpa batas, tanpa etika. Jika ini yang terjadi, maka mungkin melahirkan arsitektur dekonstruksi menuju lingkungan binaan yang anarki dan *chaos* pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, Irwin. *Culture and Environment*. California: Brooks/Cole Publishing, 1980.
- Awuy, Tommy F. *Dekonstruksi: Postmodern dan Poststrukturalis*, dalam *Postmodernisme dan Masa Depan Perdaban*. Yogyakarta: Aditya Media. 1994
- Geertz, Clifford. *Islam Observed, Religious Development in Marocco & Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1982
- Jenck, Charles. *Modern Movement in Architecture*. London: Penguin Book, 1980.
- , *Late Modernism versus Post Modernism*. New York: UIA Journal Vol 1/No.1. 1988.
- Haughton, Graham and Colin Hunter. *Sustainable Cities*. London: Jessica Kingsley Publishers Ltd. 1994.
- Klotz, Heinrich. *The History of Postmodern Architecture*. London: the MIT Press. 1988.
- Mangunwijaya, JB. *Wastu Citra*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.

- Moughtin, Cliff. *Urban Design: Street and Square*, Nottingham: University of Nottingham. 1992
- Pabottinggi, Mochtar . *Tentang Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan-Muslim*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1986
- Siswanto, Andi. *Menyangkal Totalitas dan Fungsionalisme: Postmodernisme dalam Arsitektur dan Desain Kota*. Jakarta: Jurnal Kalam, Yayasan Kalam. 1994
- Noever, Peter, ed. *Architecture in Transition: Between Deconstruction and New Modernism*. Munich: Prestel. 1991
- Norris, Christopher & Benyamin, Andrew. *What is Deconstruction?*. London: Academy Edition. 1988
- Van Langenberg, Michael. *The New Order State: Language, Ideology, Hegemony.*, dalam Arief Budiman (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*. Monash: Monash University. 1990
- Wirjomartono, Bagoes P. *Deonstrucion dan Seni Bangunan*. Jakarta: Seminar IMA Tarumanegara. 1994